

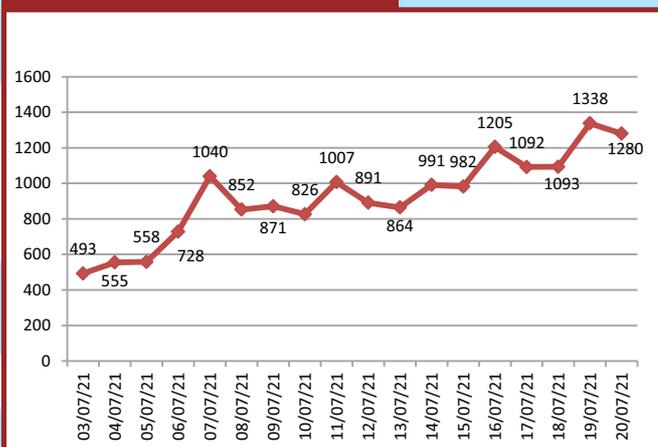


CHECK DIGITAL EDITION

Jokowi-Luhut Vs Ahli-Statistik

SESAT DATA KLAIM CORONA MEREDA

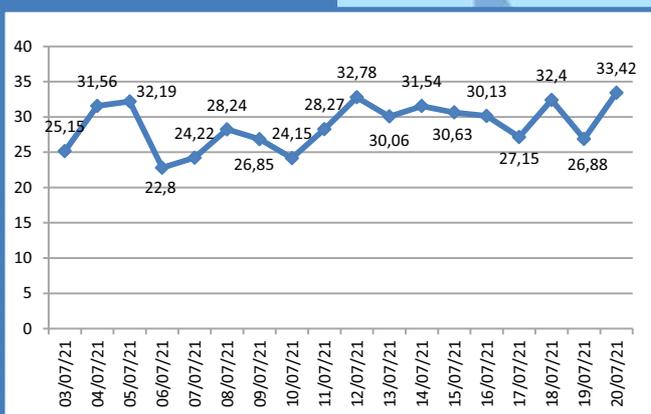
KASUS KEMATIAN



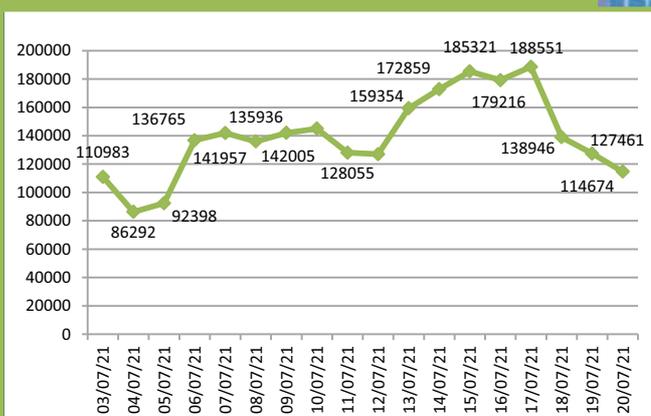
Hati sebenarnya bahagia saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Koordinator PPKM Darurat yang juga Menko Marves, Luhut Binsar mengatakan kasus Covid-19 mulai flattening dan bed occupancy rate (BOR) Rumah Sakit (RS) menurun. Namun bila yang diungkapkan tak sesuai dengan data dan fakta, merasa dibohongi kan? sakit kan? Para ahli memastikan penurunan kasus terjadi karena testing juga terus melorot. Statistik berbicara, bila kasus kematian juga terus melesat tinggi. Bahkan, Rabu (21/7) saat pemerintah kembali mengubah istilah PPKM Darurat menjadi 'level-levelan' (Level 1-4), pasien corona yang wafat mencetak rekor tertinggi sejak pandemi. Tercatat kasus meninggal dunia bertambah 1.383, sehingga total ada 77.583 jiwa yang sudah merenggang nyawa akibat virus ini. Data jumlah vaksinasi pun cukup miris. Dari 18 hari 'penguncian' wilayah Jawa-Bali, hanya 5 hari saja vaksinasi corona tembus sejuta dosis per hari. Artinya realisasi baru 25 persen dari target Jokowi. Mau data apalagi? Penurunan BOR sebagai representasi membludaknya pasien pun hanya turun tipis sebesar 1% sejak PPKM darurat berlaku. Jujur saja!

Baca Hal 11

POSITIVE RATE



PERTUMBUHAN TES INDIVIDU



Keterangan grafik:

Selama PPKM DARURAT

(3-20 Juli 2021)



BARU SETENGAH JALAN, APBN SUDAH TEKOR RP 283 TRILIUN



Bansos tunai disalurkan door to door kepada masyarakat agar sesuai sasaran dan menghindari kerumunan.

Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit alias tekor APBN hingga semester I-2021 atau periode Januari-Juni mencapai Rp 283,2 triliun. Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pendapatan negara pada semester I Januari-Juni mengalami kenaikan 9,1%. Pertumbuhan ini dinilai cukup baik.

"Kita sudah (mendapat) penerimaan Rp 88,69 triliun atau 50,9% dari target APBN tahun 2021 Rp 1.743,6 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Rabu (21/7).

Sedangkan, dari sisi belanja negara juga ikut tumbuh 9,4%. Anggaran belanja yang sudah digunakan mencapai Rp 1.170 triliun. "Kita sudah belanja Rp 1.170 triliun dari Rp 2.705

triliun yang dianggarkan atau 42,5% dari total belanja," jelasnya.

Dari situ, maka defisit dalam periode Januari-Juni atau semester I-2021 mencapai Rp 283,2 triliun. "Hingga semester I Januari-juni kita defisit 283,2 triliun. Tahun ini sesuai UU APBN total defisit Rp 1.006,4 triliun atau 0,7% dari PDB. Realisasinya 1,72% dari PDB. Pembiayaan yang direalisasikan ini masih punya Silpa Rp 135,9 triliun," jelasnya.

Selain dari APBN, Bendahara negara tersebut mengatakan pemulihan datang dari aktivitas konsumsi. Hal tersebut terlihat dari Indeks Keyakinan Konsumsi (IKK) Juni 2021 berada di level optimis yaitu 107,4. Sejak April 2021, IKK sudah berturut-turut berada di level optimis.

Sementara itu, aktivitas konsumsi terlihat juga dari Indeks Penjualan Ritel Mei 2021 mencapai 225,6 atau naik 14,7 persen secara tahunan (yoy). Adapun, penjualan mobil juga turut mendorong aktivitas konsumsi yang menunjukkan kenaikan 120 persen pada Juni 2021, dibandingkan dengan tahun lalu.

"Atau dibandingkan dengan Mei [2021] masih ada kenaikan 2,5 persen month-to-month. Ini berarti konsumen optimis kemudian melakukan konsumsi dan sangat berpengaruh memberikan dampak pada kegiatan ekonomi secara luas," katanya.

Malah Kurangi Utang

Walaupun belanja negara bertambah untuk penanganan pandemi virus corona, tetapi pemerintah malah berencana mengurangi utang. Tahun ini, pemerintah menganggarkan dana Rp 744,75 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Per 16 Juli 2021, realisasinya adalah Rp 277,36 triliun atau 37,2%.

"Kami sudah komunikasi dengan DPR, memang dibolehkan bagi pemerintah untuk melakukan realokasi belanja agar bisa memenuhi kebutuhan yang sangat tinggi di bidang kesehatan dan bansos. Ada tambahan Rp 55,2 triliun untuk tambahan di bidang kesehatan dan bansos, dan tambahan itu kita peroleh dari re-focusing belanja K/L tahap keempat. Kami akan menjaga defisit tidak melebihi dalam UU APBN," jelas Sri Mulyani Indrawati.

Selain realokasi anggaran, pemerintah juga akan memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari tahun lalu.

SAL 2020 yang bisa dipakai untuk 2021 adalah Rp 186,67 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 15,8 triliun sudah dialokasikan dalam UU APBN 2021. Nantinya SAL akan dipakai lagi sebanyak Rp 150,8 triliun.

"Tambahkan penggunaan SAL untuk mengurangi utang mencapai Rp 150,8 triliun. SAL itu untuk mengurangi utang dan menambah realokasi belanja," sebut Sri Mulyani.

Sebelumnya, pemerintah memperkirakan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada 2021 sebesar Rp 939,6 triliun atau 5,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang sesuai dengan yang dipatok sejak awal. Bahkan secara nominal pembiayaan anggaran lebih rendah.

"Defisit dan pembiayaan anggaran secara nominal lebih rendah sekitar Rp 66,8 triliun," tulis dokumen Kementerian Keuangan yang menjadi bahan rapat pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (12/7).

Realisasi ini dipicu oleh karena optimalisasi pembiayaan yang efisien, termasuk memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk investasi pemerintah serta juga mengurangi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Belanja negara diperkirakan terealisasi hingga 98,2% dari APBN 2021 yang sebesar Rp 2.700,4 triliun. Dibandingkan tahun sebelumnya ada pertumbuhan sebesar 4%. Sementara itu pendapatan negara tumbuh 6,9% menjadi Rp 1.760,7 triliun (101%). (ist)

PROGRAM PEN TERUS MENJADI INSTRUMEN PENANGANAN KESEHATAN & PEMULIHAN EKONOMI

Realisasi PEN 2021 s.d. 16 Juli mencapai Rp277,36 T atau 37,2% dari Pagu Rp744,75 T

KESEHATAN

Pagu Rp 214,95 T Realisasi Rp 54,10 T (25,2%)

Manfaat :

- Diagnostik untuk Testing dan Tracing
- Therapeutic untuk biaya perawatan, insentif nakes, santunan kematian, serta obat dan APD
- Pengadaan 53,91 juta dosis vaksin
- Bantuan Iuran JKN untuk 19,15 juta orang
- Insentif perpajakan Kesehatan termasuk PPN dan Bea Masuk

PERLINDUNGAN SOSIAL

Pagu Rp 187,84 T Realisasi Rp82,22T(43,8%)

Manfaat :

- PKH untuk 9,9 Jt KPM
- Kartu Sembako untuk 15,93 Jt KPM
- BST untuk 10 Jt KPM
- BLT Desa untuk 5,2 Jt KPM
- Kartu Pra Kerja untuk 2,82 Jt Orang
- Bantuan Kuota Internet untuk 32,3 Jt penerima
- Subsi Listrik untuk 32,6 Jt Penerima

PROGRAM PRIORITAS

Pagu Rp117,94T Realisasi Rp44,44 T (37,7%)

Manfaat :

- Padat Karya K/L untuk 810 Rb Naker
- Pariwisata a.l. untuk KSPN, Ecowisata, serta pelatihan SDM
- Ketahanan Pangan a.l. program food estate dan irigasi
- ICT a.l. penyediaan infrastruktur TIK serta penyiaran publik
- Kawasan Industri a.l. untuk pengembangan kawasan

DUKUNGAN UMKM DAN KORPORASI

Pagu Rp161,20 T Realisasi Rp51,53 T (32%)

Manfaat :

- Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) 9,8 Jt usaha
- UP UMKM untuk 18,1 Juta UMKM
- UP Korporasi untuk 21 Korporasi
- Penempatan Dana pada bank dengan total penyaluran kredit sejak 2020 mencapai Rp404,53 T kepada 5,25 juta debitur
- Subsidi Bunga untuk 3,5 Juta debitur

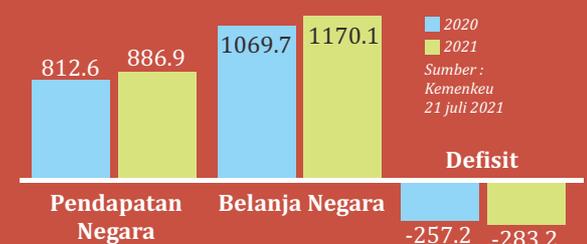
INSENTIF USAHA

Pagu Rp62,83T Realisasi Rp45,07 T(71,7%)

Manfaat :

- PPh 21 DTP untuk 90.858 Pemberi kerja
- PPh Final UMKM DTP untuk 129.215 UMKM
- Pembebasan PPh 22 Impor untuk 15.989 WP
- Pengurangan Angsuran PPh 25 untuk 69.654 WP
- Pengembalian Pendahuluan PPN untuk 1.564 WP
- Penurunan Tarif PPh Badan manfaat untuk seluruh WP
- PN DTP Properti untuk 709 Penjual
- PPBM Mobil untuk 5 Penjual

REALISASI PENDAPATAN, BELANJA, DAM DEFISIT APBN (JUNI 2020/2021)



BPOM Larang Promosi Ivermectin Sebagai Obat Covid-19

MENUNGGU PERMINTAAN MAAF PEJABAT-POLITISI YANG 'OVERCLAIM'

Jakarta - Badan POM (BPOM) menegaskan hingga saat ini Ivermectin masih dalam tahapan uji klinis dan meminta semua pihak stop promosikannya sebagai obat Covid-19. Alasannya karena Ivermectin merupakan obat keras dan Expanded Access Program (EAP) bukanlah persetujuan Izin Edar.

Ahli epidemiologi dari Universitas Airlangga Windhu Purnomo pun mendorong para pejabat dan politisi yang sempat 'overclaim' terhadap penggunaan Ivermectin sebagai obat terapi pasien terpapar virus corona untuk meminta maaf kepada publik.

"Ya seharusnya mereka minta maaf, tapi apa tradisi kita minta maaf? itu masalahnya. Jadi kita mau minta maaf ya sulit juga karena tradisi kita sekarepe dewe (semaunya sendiri). Jadi kita di Indonesia ini, orang tidak kompeten ikut bicara, kemudian pejabat yang sama sekali tidak punya kompetensi ngomong tentang obat," kata Windhu, Rabu (21/7).

Sebelumnya, Presiden Direktur PT Harsen Laboratories Haryoseno selaku produsen obat Ivermectin dengan merek Ivermax12, telah meminta maaf kepada publik atas overclaim yang dilontarkan anak buahnya.

Selain minta maaf, Windhu juga meminta pemerintah menyampaikan sejujurnya soal kegunaan dan fungsi Ivermectin. Ini disebutnya penting agar masyarakat tidak salah paham dan mengonsumsi obat tanpa rekomendasi dari dokter yang kemudian berpotensi membahayakan nyawa masyarakat. Windhu pun berharap masalah Ivermectin ini dapat dijadikan pengingat. Pesannya, tak perlu ada lagi pejabat atau anggota DPR yang meng-

glorifikasi dan seakan endorse produk obat maupun vaksin Covid-19.

Indonesia, kata Windhu, punya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang berwenang menyampaikan rekomendasi berdasarkan uji klinik dan kajian saintifik. Masyarakat dan pemerintah harus mempercayakan sepenuhnya wewenang soal obat dan vaksin pada BPOM.

Menurut Windhu, pejabat yang seakan endorse Ivermectin tidak etis. Para pejabat itu bahkan bisa dituntut di kemudian hari apabila penggunaan obat yang mereka promosikan ternyata malah membawa efek samping serius dan berbahaya pada masyarakat yang mengonsumsinya.

Belum Ada Izin Edar

Sebelumnya, Badan POM menjelaskan jika dibutuhkan penggunaan lebih luas oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan, maka Kementerian Kesehatan bisa mengajukan permohonan penggunaan dengan skema EAP (Expanded Access Program).

"Apabila dibutuhkan penggunaan Ivermectin yang lebih luas oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan, maka Kementerian Kesehatan dapat mengajukan permohonan penggunaan Ivermectin dengan skema EAP," tulis BPOM dikutip dari laman resminya, Rabu (21/7).

Sebagai informasi, EAP atau skema perluasan penggunaan khusus adalah skema yang memungkinkan perluasan penggunaan obat yang masih dalam tahap uji klinis. Dengan begitu bisa digunakan di luar uji klinis dan jika diperlukan dalam kondisi darurat.

Dalam keterangannya, penggunaan obat dengan EAP bukanlah izin edar

atau EUA (Emergency Use Authorization) yang ditujukan kepada Industri Farmasi. Namun merupakan persetujuan penggunaan pada Kementerian/Lembaga penyelenggara urusan pemerintah bidang, institusi, atau fasilitas pelayanan kesehatan.

BPOM menambahkan industri farmasi yang memproduksi Ivermectin dan pihak manapun tidak mempromosikan obat itu pada petugas kesehatan atau masyarakat. Alasannya karena Ivermectin merupakan obat keras dan EAP bukanlah persetujuan Izin Edar. "Meningat Ivermectin adalah obat keras dan persetujuan EAP bukan merupakan persetujuan Izin Edar, maka ditekan kepada Industri Farmasi yang memproduksi obat tersebut dan pihak manapun untuk tidak mempromosikan obat tersebut, baik kepada petugas kesehatan maupun kepada masyarakat," jelas BPOM.

Selain itu, BPOM juga melakukan pengawasan dan mengawal distribusi obat EAP hanya dilakukan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disetujui. Untuk para pemilik persetujuan dan penyedia obat dengan EAP diharuskan melakukan beberapa hal. Ini dimulai dari pemantauan farmakovigilans, hingga mencatat dan pelaporan pengadaan, penyaluran serta penggunaan obat pada Badan POM.

"Pemilik Persetujuan dan Penyedia Obat EAP wajib melakukan pemantauan farmakovigilans dan pelaporan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) maupun Efek Samping Obat (ESO), serta melakukan pencatatan dan pelaporan setiap bulan terkait pengadaan, penyaluran, dan penggunaan Obat EAP kepada Badan POM,"

ungkap BPOM.

Sebelumnya, anggota DPR ramai-ramai mendukung langkah Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Moeldoko yang mengirimkan ivermectin yang disebut-sebut sebagai obat yang mengalahkan Covid-19 ke Kudus. Ivermectin itu dikirimkan Moeldoko ke tiga kecamatan yang dianggap paling berat situasinya, yaitu Kecamatan Jati, Kecamatan Kota dan Kecamatan Mejubo. Ivermectin gratis itu dibagikan kepada ratusan warga yang sedang dirawat di rumah sakit atau pun yang sedang isolasi mandiri.

Terpisah, Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo, meminta kegaduhan terkait obat Ivermectin dihentikan guna memberikan waktu kepada BPOM untuk menyelesaikan proses uji klinis.

"Sekarang BPOM lagi memberikan izin untuk uji klinis Ivermectin yang dilakukan di rumah sakit. Untuk mengeluarkan itu [EUA] harus berdasarkan hasil evaluasi bagaimana keamanan, efektivitas, risiko karena itu obat keras yang tidak diperuntukkan pemakaian sekali pakai, melainkan jangka panjang," kata Handoyo saat dihubungi, Kamis (15/7).

Ia meyakini, BPOM akan segera mengeluarkan EUA Ivermectin untuk terapi Covid-19 bila hasil uji klinis menunjukkan bahwa obat itu aman untuk digunakan. Handoyo berkata, BPOM tidak mungkin sudah mengeluarkan izin darurat Ivermectin saat ini karena belum menyelesaikan proses uji klinis. Kalau belum selesai, tapi sudah dikeluarkan, jadi lucu nanti," tuturnya. (ist)

GADUH PENGGUNAAN IVERMECTIN



AHLI EPIDEMIOLOGI DARI UNIVERSITAS AIRLANGGA WINDHU PURNOMO

"Harusnya pejabat minta maaf. Pemerintah juga harus menyampaikan sejujurnya soal kegunaan dan fungsi Ivermectin. Ini penting agar masyarakat tidak salah paham dan mengonsumsi obat tanpa rekomendasi dari dokter yang kemudian berpotensi membahayakan nyawa." (Rabu, 21/7/2021)



KEPALA BPOM PENNY K LUKITO

"Belum ada EUA untuk Ivermectin, karena uji klinis baru dimulai. Kalau Ivermectin adalah obat uji untuk pengobatan Covid-19. Adanya skema EAP (Expanded Access Program)." (Rabu, 21/7/2021)



KEPALA STAF KEPRESIDENAN MOELDOKO

"Saya selaku Ketua Umum HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) sungguh sangat mendukung program edukasi hari ini, untuk mengenalkan lebih dekat tentang Ivermectin sebagai salah satu obat yang telah terbukti efektif di dalam penyembuhan Covid-19 di berbagai negara." (Senin, 28/6/2021).



KETUA DPR PUAN MAHARANI

"Kita dukung proses ini karena bagian dari ikhtiar penanganan pandemi. Namun kita harus tetap patuh dan tunduk pada prosedur ilmiah melalui proses uji klinis. Saya mendapat laporan bahwa BPOM mengizinkan dokter memberikan obat itu kepada masyarakat yang membutuhkan, asal penggunaannya sesuai protokol uji klinis yang disetujui. Ini kabar yang menggembirakan." (Jumat, 9/7/2021).



ANGGOTA KOMISI IX DPR NETTY PRASETIYANI AHER

"India menjadi salah satu negara yang menghentikan penggunaan Ivermectin untuk obat terapi Covid-19. Ada peringatan dari WHO bahwa obat ini belum dapat disimpulkan bisa atau tidaknya digunakan untuk pasien Covid-19. Hanya boleh untuk uji klinis saja." (Jumat, 25/6/2021).



KETUA FRAKSI PAN DPR RI SALEH PARTAONAN DAULAY

"Kalau sudah dipergunakan, semestinya yang perlu dilakukan adalah studi lanjutan. Termasuk uji klinis dan Emergency Use Authorization (EUA). Harus ada percepatan dan pemotongan birokrasi yang tidak perlu. Bagus juga jika dilakukan benchmark dengan negara-negara lain yang sudah lebih dahulu berhasil dan telah mengeluarkan EUA. Dalam situasi seperti ini, harus ada sense of emergency-nya. Pandemi tidak bisa diatasi dalam format business as usual." (Senin, 19/7/2021).

WADUH! 86% WILAYAH DI JATIM MASUK ZONA MERAH CORONA

Surabaya- Sebanyak 33 dari 38 kabupaten/kota atau sekitar 86 persen wilayah di Jawa Timur (Jatim) berstatus zona merah atau berisiko tinggi terhadap penularan Covid-19. Bahkan tak ada satu pun daerah berstatus zona kuning (risiko rendah), apalagi zona hijau (tidak berisiko penularan virus Corona) di provinsi ini.

"Pekan ini ada 33 daerah, setelah pekan lalu 19 daerah [zona merah]. Lalu ada lima daerah zona oranye/jingga atau berisiko sedang," ujar anggota Satuan Tugas Kuratif Covid-19 Jawa Timur, Makhyan Jibril, Rabu (21/7).

Jibril menjelaskan bertambahnya daerah zona merah di Jatim karena kasus yang meningkat selama sepekan terakhir. "Penentuan zona dari Satgas Pusat juga karena didasarkan 15 indikator epidemiologi mingguan," ujarnya. Selain itu, kata dia, terdapat faktor peningkatan kapasitas testing (pengujian) maupun pemeriksaan sampel yang naik tiga kali lipat.

Khofifah Siapkan SK Pelonggaran

Meskipun demikian, Gubernur Jawa Timur Khofifah telah menyiapkan Surat Keputusan Pelonggaran PPKM Darurat tersebut. Terdapat beberapa sektor yang akan diperlonggar. Di antaranya pasar tradisional selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari, diizinkan dibuka sampai dengan pukul 15.00 dengan kapasitas mak-

simal 50%.

Lalu pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cuci kendaraan, dan usaha kecil lain yang sejenisnya juga diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00. Dimana pengaturan teknisnya diatur oleh pemerintah daerah.

Kemudian warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00. Maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 30 menit.

"Di Jawa Timur ada 12 Kabupaten/Kota yang masuk PPKM level 4. Lalu ada 26 Kabupaten/Kota yang masuk PPKM level 3. Aturan di daerah yang menerapkan PPKM level 3 dan level 4 sama. Ditunggu insyaallah hari ini keluar SK Gubernurnya," ujar Khofifah.

Kota Malang Perkuat RT

Setelah menggelar evakuasi PPKM Darurat, Rabu (21/7), Pemerintah Kota Malang akan terus memperkuat koordinasi dan penganan di tingkat Rukun Tetangga (RT). Rapat yang langsung dipimpin oleh Walikota Malang, Drs. Sutiaji menunjukkan tampak keberhasilan menurunkan penyebaran Covid-19. Saat ini positive rate di Kota Malang di bawah 2%.

"Angka positif rate di Kota Malang

sudah menurun dan sekarang berada di angka 2% lah, sebenarnya 1 koma sekian persen. Kalau standar Nasional kan sebenarnya positif rate harus di bawah 5% ya minimal," katanya.

Saat disinggung mengenai PPKM yang akan berlangsung hingga 25 Juli 2021, Walikota mengaku tak ada perubahan dalam pelaksanaan PPKM kali ini. "Hanya ada perubahan nama dari peraturan mendagri saja, untuk penerapannya sama, cuman ini yang membedakan pelabelan tingkat PPKM di daerah saja, kalau Malang kita di Level 4," terusnya menjelaskan.

"Secara substansi tidak ada perubahan, jam operasional juga sama termasuk apa yang harus dilakukan pemda, untuk kota, dan kabupaten yang ada di Jatim rata-rata masuk level 4 semua. Kita perbanyak di testing setelah ini, dan perkua di PPKM Mikro tingkat RT/RW," jelasnya. (ist,ree)



Petugas mempersiapkan tempat isolasi pasien Covid-19 di Mal Pelayanan Publik kawasan Lingkar Timur Sidoarjo, Jawa Timur.

PERSEBARAN CORONA DI JATIM BERDASARKAN ZONASI RISIKO

33 KAB/KOTA ZONA MERAH

Kab. Ponorogo, Kab. Kediri, Kota Batu, Kab. Madiun, Kab. Malang, Kab. Mojokerto, Kab. Tuban, Kab. Sidoarjo, Kab. Banyuwangi, Kab. Ngawi, dan Kota Kediri, Kab. Lumajang, Kab. Situbondo, dan Kab. Bojonegoro. Selanjutnya, Kab. Bangkalan, Kota Madiun, Kab. Jember, Kab. Magetan, Kab. Nganjuk, Kab. Probolinggo, Kota Surabaya, Kab. Trenggalek, Kab. Jombang, Kab. Blitar, Kab. Gresik, Kab. Pacitan, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kab. Tulungagung, Kab. Pasuruan, Kota Malang, Kab. Lamongan, dan Kab. Bondowoso.

5 KAB/KOTA ZONA ORANYE

Kota Probolinggo, Kab. Sumenep, Kota Blitar, Kab. Pamekasan dan Kab. Sampang.

PERKEMBANGAN COVID-19 DI KOTA JAWA TIMUR

Konfirmasi

Jawa Timur : 253105 +3859

Nasional : 2950058 +38325

Sembuh

Jawa Timur : 188911 +2966

Nasional : 2323666 +29791

Aktif

Jawa Timur : 46987 +550

Nasional : 550192 +7254

Meninggal

Jawa Timur : 17207 +343

Nasional : 76200 +1280

Keterangan:
update terakhir
2021-07-21
14:46:12
(<https://info.covid19.jatimprov.go.id/>)



Suasana sidang perdana class action perkara perdata lingkungan dengan tergugat PT Greenfields Indonesia, di Pengadilan Negeri (PN) Blitar, Rabu (21/7/2021) yang tidak dihadiri pihak tergugat maupun turut tergugat.

BLITAR- Banyak pihak kecewa dengan ketidakhadiran pihak tergugat dalam kasus dugaan pencemaran lingkungan di Kabupaten Blitar dalam sidang perdana, Rabu (21/7). Ironisnya, PT Greenfields Indonesia (GI) selaku tergugat tanpa ada alasan jelas tak menghadiri sidang. Sementara dari Gubernur Jatim dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim sebagai turut tergugat 1 dan 2, juga tidak hadir dengan alasan Pandemi Covid-19.

Sidang class action Nomor 77/Pdt.G/LH/2021/PNBlit di Pengadilan Negeri (PN) Blitar ini sempat molor sekitar 3,5 jam. Dari jadwal semula jam 09.00 WIB baru digelar jam 12.30 WIB di Ruang Sidang Cakra.

Persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim, Ary Wahyu Irawan dan hanya dihadiri kuasa hukum penggugat saja.

Setelah sidang dibuka Ketua Majelis Hakim Ary menanyakan persyaratan surat kuasa dari 9 orang warga, yang mewakili 258 kepala keluarga (KK) yang menggugat dan semuanya sudah ada lengkap.

Selanjutnya untuk tergugat, sesuai data dari petugas yang mengirimkan gugatan dan diterima pegawai di lokasi sesuai alamat di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar. "Sudah diterima oleh salah satu pegawai di sana, tapi tidak mau menandatangani tanda terima karena alasan kantornya ada di Malang. Tapi tetap dianggap sah sudah menerima gugatan yang dikirimkan," tutur Ary.

Demikian juga untuk turut tergugat 1 dan 2 yaitu dari pihak Gubernur Jatim dan DLH Provinsi Jawa Timur, sudah menerima dan mengirimkan surat tertanggal 19 Juli 2021. "Menyampaikan Biro Hukum Pemprov Jatim, karena ada wabah Covid-19 minta ditunda sampai 28 Juli 2021," ungkap Ary.

Karena para tergugat pada sidang pertama ini tidak atau belum hadir, maka akan dilakukan pemanggilan

kembali sebelum sidang kedua yang disepakati antara majelis hakim dan kuasa hukum penggugat pada 9 Agustus 2021.

Selama ada alasan yang sah, masuk akal dan bisa juga diterima majelis hakim, Ary mengaku tidak bisa serta merta untuk memutuskan tergugat tidak menggunakan haknya. "Untuk tergugat PT Greenfields Indonesia, memang tidak memberikan jawaban atau alasan tidak hadir alasan apa. Kalau memang beritikad baik sebetulnya dapat juga bisa disampaikan ke kantornya di Malang, meskipun alasan-nya yang disini (Blitar) hanya kandang atau peternakan," tandas Ari yang juga menjabat Wakil Ketua PN Blitar ini.

Untuk agenda sidang kedua pada 9 Agustus 2021, yaitu sanggahan apakah class action ini sah atau tidak. Sebelum masuk ke pokok perkaranya, terkait pencemaran lingkungan hidup.

Sebelum sidang ditutup, kuasa hukum warga sempat menanyakan syarat hakim yang menyidangkan harus bersertifikat lingkungan hidup. Dijawab oleh Ary kalau dirinya sudah

mempunyai sertifikat lingkungan sejak 2020 lalu.

Secara terpisah salah satu Tim Kuasa Hukum warga yang menggugat, Hendi Priyono menyatakan tentu saja pihaknya kecewa. Meski demikian, pihaknya memilih akan fokus mempersiapkan semua bukti yang dibutuhkan. "Selanjutnya kita akan mempersiapkan pembuktian pada sidang kedua 9 Agustus 2021, apakah 9 orang ini mewakili kelompok dari 258 KK kita harus bisa membuktikan sebelum masuk gugatan pokok perkara. Karena ada penetapan, apakah perkara ini bisa dilanjutkan menjadi gugatan class action," kata Hendi.

Mengenai ketidakhadiran tergugat, serta turut tergugat 1 dan 2 ditegaskan Hendi akan tetap mendapat panggilan selanjutnya untuk hadir dalam persidangan. Berapa kali batasan panggilan tergugat dan turut tergugat? sesuai hukum acara tergugat dipanggil 3 kali dan turut tergugat 2 kali. "Kalau 3 kali dan 2 kali berturut-turut tidak hadir dipersidangan maka otomatis perkara ini masuk ke tahap berikutnya," tegasnya. (ais)

Babak Baru Dugaan Pencemaran Greenfields

KECEWA KALA SEMUA TERGUGAT TAK HADIRI SIDANG PERDANA



Walikota Surabaya, Ery Cahyadi mempersiapkan ruang isolasi di setiap kelurahan di Kota Pahlawan yang rencananya beroperasi mulai Jumat, 23 Juli 2021.

Tak Ada Lagi Isoman Rumah di Kota Surabaya

MULAI JUMAT, WARGA BERGEJALA
TEMPATI RUANG ISOLASI KELURAHAN

kasusnya banyak, ya kita akan tambah bed," katanya.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi ada pasien yang tidak terangani dengan tepat saat menjalani isoman di rumah. Alhasil, tak sedikit kasus kematian yang terjadi ketika isolasi mandiri.

"Saya berharap warga Surabaya kalau ada sakit sedikit, flu, batuk, pilek langsung ke Puskesmas untuk swab, karena Covid-19 bukan aib tapi penyakit yang bisa disembuhkan. Kalau takut tidak mau diswab karena malu positif Covid-19, akhirnya Surabaya kasusnya nambah terus. Kalau nambah terus, kapan ekonominya Surabaya akan bergerak," ungkapnya.

Dikatakannya, isolasi di tingkat kelurahan diberikan bagi warga yang dinyatakan positif. Untuk Orang Tanpa Gejala (OTG) dibawa ke tempat isolasi di kelurahan, Asrama Haji Sukolilo atau RS Lapangan Tembak. Kalau ber-gejala ringan-sedang dibawa ke RS Lapangan Tembak atau RS Rujukan, sedangkan yang berat di rumah sakit rujukan.

"Sehingga tidak ada lagi warga Surabaya yang satu keluarga diisolasi mandiri, kalau rumahnya tidak memenuhi syarat untuk isolasi mandiri. Misal ada satu sakit lalu empat negatif, harus kita tarik ke tempat isolasi yang sudah disediakan," tegas mantan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu.

Untuk itu, ia meminta kepada setiap lurah dan camat agar melakukan sosialisasi dan memberi pengertian kepada warga agar dapat memahami kondisi yang ada. Dengan pemisahan antara orang yang positif dan tidak diharapkan dapat segera memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Tak hanya itu, penyediaan tempat isolasi mandiri ini diharapkan dapat mengurangi beban dari RS Rujukan. Sebab, sampai saat ini kapasitas RS Rujukan masih penuh.

Terkait hasil evaluasi PPKM Darurat diakui Ery bisa menurunkan kasus baru di Surabaya. Tercatat secara keseluruhan Surabaya mengalami penurunan infeksi 100-150 orang per hari. "Dari PPPKM Darurat yang dilakukan evaluasinya memang Surabaya ada penurunan, meskipun belum signifikan, tapi sudah ada penurunan," katanya.

Tak hanya kasus baru Covid-19 yang berkurang, tetapi kematian juga mengalami penurunan. Dari sebelumnya 180 kematian per hari, kini 120-130 per hari atau mengalami penurunan sebanyak 50 jiwa tiap harinya.

Eri mengatakan, data tersebut tidak sama dengan data di www.lawancovid19.com. Sebab data

yang ada di website tersebut merupakan data orang yang sudah sakit dan positif dan masuk data NAR. "Tapi warga Surabaya ada yg sakit tidak segera periksa, diberikan obat flu. Setelah parah, setelah sesak nafas gak kuat baru naik ke Puskesmas, telat ngasih oksigen, akhirnya meninggal dan tidak terdata dalam NAR atau covid. Karena apa? Karena belum swab antigen dia meninggal dulu. Sehingga kenapa angka kematiannya lebih besar, tidak seperti laporan kematian di lawan covid," jelasnya.(ard)

PERKEMBANGAN COVID-19 DI

KOTA SURABAYA

Konfirmasi : 40095

Aktif : 10557

Sembuh : 28053

Meninggal : 1485

Suspek : 50

Probable : 18

Diisolasi : 50

Discarded : 8388

Keterangan: update terakhir 2021-07-21 14:46:12 (<https://infocovid19.jatimprov.go.id/>)

SURABAYA- Pemkot Surabaya menyiapkan tempat isolasi khusus bagi warga yang terkonfirmasi terpapar virus Covid-19 yang berada di seluruh kelurahan Kota Pahlawan. Langkah ini diambil agar tidak ada kasus buruk, seperti meninggal, saat warga menjalani isolasi mandiri (isoman) di rumah. Selain itu, juga sebagai solusi untuk warga Surabaya yang kediamannya tak memenuhi syarat untuk melakukan isoman.

"Kita melihat harus memutus mata rantai. Seminggu yang lalu saya sudah sampaikan di masing-masing kelurahan ada tempat isolasi mandiri di kelurahan. Hari ini sudah siap tempatnya semua, Jumat (23/7/2021) sudah operasional," kata Walikota Surabaya Eri Cahyadi, Rabu (21/7).

Untuk diketahui, Kota Surabaya memiliki 31 kecamatan dan 154 kelurahan. Terkait tempat isolasi, Eri mengatakan menggunakan gedung sekolah yang sangat representatif karena ada AC dan memiliki ruang yang cukup luas. Setiap kelurahan nanti akan mendapat jatah 30 bed dan akan ada pendampingan dari tenaga kesehatan (nakes). "Kalau misalnya

TERKAIT BERAS BANTUAN KOTA MADIUN,
TERSISA SATU KECAMATAN YANG BELUM DIKIRIM

MADIUN - Beras Bantuan (BB) PPKM 2021 terus dikebut pengirimannya oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun dan Bulog Madiun. Saat ini tersisa satu kecamatan lagi yang belum dikirim.

"Harapannya beberapa bantuan ini bisa tersalurkan tepat sasaran. Khususnya bagi warga Kota Madiun yang membutuhkan. Masyarakat terdampak pandemi Covid-19, baik yang terdampak dalam segi ekonomi maupun kesehatan," jelas Walikota Madiun, Maldi sesuai memberangkatkan 7 truk BB bersama Kabulog Madiun, Ahmad Mustari di halaman Balaikota, Rabu (21/7).

Pemberangkatan yang kedua tersebut dilakukan untuk memenuhi bantuan 2 kecamatan. Yakni Kecamatan Kartoharjo dan Manguharjo. Sedangkan Kecamatan Taman menyusul pemberangkatan BB terakhir.

Sementara itu, Kabulog Madiun, Ahmad Mustari memaparkan bahwa BB untuk Kecamatan Taman akan segera dikirim. Namun masih menunggu rambu-rambu dari Walikota Maldi. "Ini 2 kecamatan sudah lunas.

Tinggal 1 kecamatan. Pada dasarnya kami siap kapanpun. Tergantung beliau (Maldi) mintanya kapan," kata Ahmad.

Setiap truk pengangkut BB isinya berbeda-beda, menyesuaikan dengan kelurahan yang dituju. Sehingga pengiriman lebih sistematis. "Ini 7 truk untuk 2 Kecamatan 14 Kelurahan. Per truk beda-beda ada yang 1 truk bisa memuat beras buat 2 kelurahan, ada yang 3 kelurahan. Menyesuaikan," imbuhnya.

Ahmad berterimakasih kepada Pemkot Madiun karena dapat bersinergi dengan baik. Sehingga Bulog dapat menyalurkan BB dari Presiden dengan lancar. "Ini kedua kali di Kota Madiun. Kekurangannya Senin kemarin untuk Manguharjo dan Kartoharjo. Untuk Kecamatan Taman tunggu koordinasi. Kalau terlalu numpuk di masyarakat kan kurang bagus juga, nanti kesian berasnya," tutupnya.

Sebelumnya, Walikota Maldi memastikan warganya tidak akan ada yang kelaparan selama pandemi berlangsung. Maldi mengaku siap menjamin kebutuhan pangan masyarakat

yang memerlukan. "Masyarakat bisa menghubungi RT atau RW setempat untuk kemudian diteruskan ke kelurahan dan tim Satgas Covid-19 Kota Madiun," katanya.

Maldi juga menginstruksikan pembuatan tenda logistik di Rumah Dinas Wali Kota yang dapat diakses 24 jam. "Tenda Logistik ini menyiapkan beras 7 ton dan 400 paket isoman yang terdiri dari 4 kilogram beras, 2 kilogram gula, 1 liter minyak goreng, dan 2 bungkus mie instan," ujarnya.

Kebutuhan isolasi mandiri juga akan dipenuhi dengan memberdayakan 1 PKL di tiap RT. PKL tersebut akan mendapatkan bahan dari Pemerintah Kota Madiun. "Artinya akan ada 1 dapur umum di tiap RT. Di PKL tersebut juga akan disediakan vitamin dan masker gratis untuk masyarakat yang membutuhkan. Kebutuhan air minum akan disediakan PDAM Kota Madiun," ujarnya.

Kepada seluruh jajarannya, Maldi juga memerintahkan ASN Pemkot Madiun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan membeli produk UMKM di sekitar tempat tinggal



Walikota Maldi saat menunjukkan beras bantuan (BB) yang akan dikirimkan ke 2 Kecamatan yakni Manguharjo dan Kartoharjo, Rabu (21/7/2021).

masing-masing. "Kegiatan pembelian di UMKM ini wajib dilaporkan kepada Kepala OPD dan akan dilakukan pengecekan secara berkala," katanya lagi. (ger)

DATA PENERIMAAN BANSOS KOTA MADIUN

- Bantuan Pangan Non Tunai Daerah: **2.528**

- Bantuan Pangan Non Tunai Pusat: **5.288**

- Bantuan Sosial Terpadu 2 x Rp 300.000: **9.203**. (BST akan dicairkan mulai 29 Juli 2021).

- Bantuan pusat berupa beras 5 Kg di luar DTKS: **3.000**

A portrait of Sarah Gilbert, a woman with shoulder-length reddish-brown hair and black-rimmed glasses. She is wearing a dark blue cardigan over a patterned top. The background is a blurred outdoor setting with greenery and a building structure.

SARAH GILBERT

*Bukan Demi Uang, Ciptakan
AstraZeneca untuk Kemanusiaan*

Nama Prof Sarah Gilbert mengundang perhatian publik dunia akhir pekan ini. Dia merupakan seorang ahli imunologi berkewarganegaraan Inggris yang menemukan vaksin Covid-19 AstraZeneca. Tak hanya itu, dia melepas paten vaksin tersebut yang sebenarnya bisa menjadikannya sebagai mahakayaraya. Terimakasih Sarah!

Pembuat vaksin Covid-19 AstraZeneca, Sarah Gilbert, tengah menjadi perbincangan dunia setelah video yang menampilkan dirinya mendapat standing applause dari seluruh penonton turnamen tenis Wimbledon, beberapa waktu lalu itu, viral.

Di video viral itu, terlihat Sarah Gilbert berada di antara ribuan penonton dalam acara pembukaan pertandingan turnamen tenis Wimbledon antara Novak Djokovic melawan Jack Draper pada 28 Juni 2021.

Dalam video itu, terdengar pengumuman bahwa ada individu dan perwakilan organisasi yang telah berkontribusi pada negara dalam menghadapi pandemi, termasuk telah membantu turnamen Wimbledon tersebut dapat digelar. Kamera lalu menangkap ekspresi terkejut perempuan berbaju merah berkacamata, dia adalah Sarah Gilbert.

Sekitar 7.500 penonton pertandingan lalu memberikan tepuk tangan yang meriah. Ekspresi Sarah Gilbert pun mencuri perhatian global, hingga akhirnya video tersebut viral.

Dia mendapatkan apresiasi besar dari banyak pihak, lantaran profesor vaksinologi di Universitas Oxford itu melepaskan hak patennya atas vaksin tersebut, sehingga bisa diproduksi dalam jumlah besar dan dengan harga murah.

Karena itulah, tidak berlebihan rasanya jika dia mendapatkan standing ovation di Lapangan Tengah Kejuaraan Wimbledon 2021 kemarin. Wimbledon sendiri adalah sebuah turnamen tenis terkemuka yang diselenggarakan selama sekitar dua minggu setiap tahunnya.

Pada kesempatan itu, Gilbert termasuk salah satu individu inspiratif yang diundang untuk menonton pertandingan hari pertama pertandingan dari zona kerajaan Inggris.

Bermula Dari Malaria

Mengutip BBC, Sarah Gilbert merupakan wanita kelahiran Kettering, Northamptonshire pada April 1962. Ayahnya bekerja di bisnis sepatu sementara ibunya adalah seorang guru bahasa Inggris dan anggota masyarakat opera amatir lokal.

Setelah menyelesaikan gelar doktornya, dia mendapat pekerjaan di pusat penelitian pembuatan bir. Di sana dia mempelajari cara memanipulasi ragi pembuatan bir, sebelum kemudian beralih bekerja di bidang kesehatan manusia.

Dalam sebuah wawancara, Gilbert mengaku bahwa dirinya tidak pernah bermaksud untuk menjadi spesialis vaksin. Namun pada pertengahan 1990an, dia berada dalam pekerjaan akademis di Universitas Oxford dan melihat genetika malaria. Hal itulah yang

membuatnya tertarik pada pekerjaan pada vaksin malaria.

Karimnya yang cemerlang tidak lantas membuatnya lupa akan perannya menjadi seorang ibu. Dia mengaku bahwa hidupnya menjadi sedikit lebih rumit ketika dia melahirkan anak kembar tiga. Meski begitu, dia menjalankannya dengan sebaik mungkin. Salah seorang putranya, Freddie, menggambarkan ibunya sebagai sosok yang selalu mendukung dan mengutamakan kepentingan anak-anak.

Gilbert sendiri mengaku bahwa dia membebaskan anak-anaknya untuk memilih jalan hidupnya masing-masing. Meski begitu, semua anaknya pada akhirnya memilih untuk belajar biokimia di universitas.

Dari Oxford, Dr Gilbert naik pangkat, menjadi profesor di Jenner Institute yang bergengsi di universitas. Dia membentuk kelompok penelitiannya sendiri dalam upaya untuk membuat vaksin flu universal, yang berarti vaksin yang akan efektif melawan semua jenis varian yang berbeda.

Pada tahun 2014, di memimpin uji coba pertama vaksin Ebola. Dan ketika virus Middle East Respiratory Syndrome (MERS) menyerang, dia pergi ke Arab Saudi untuk mencoba mengembangkan vaksin untuk bentuk virus corona ini.

Uji coba kedua vaksin itu baru saja dimulai ketika pada awal 2020, Covid-19

mulai menyebar sejumlah negara di dunia. Pada saat itu, dia segera menyadari bahwa dia mungkin bisa menggunakan pendekatan yang sama.

Melawan Covid-19

Di masa pandemi Covid-19, dia dan sejumlah rekannya menghabiskan waktu beberapa minggu untuk membuat vaksin yang bekerja melawan Covid-19 di laboratorium. Gilbert menggambarkan proses tersebut lebih sebagai serangkaian langkah kecil daripada menjadi momen terobosan besar.

"Sejak awal, kami melihatnya sebagai perlombaan melawan virus, bukan perlombaan melawan pengembangan vaksin lain," kata Gilbert awal tahun ini. "Kami adalah universitas dan kami tidak berada di sini untuk menghasilkan uang," tegasnya.

Di antara deretan ilmuwan yang berada di dalam tim Prof Sarah Gilbert, terdapat peran serta peneliti asal Indonesia. Dia adalah dr. Indra Rudiansyah, PhD, peneliti Biofarma yang sedang melanjutkan studi di University of Oxford. BBC mengabarkan bahwa Indra sebelumnya juga pernah melakukan penelitian vaksin malaria.

Murid lain dari Gilbert di Oxford bergabung di dalam TFRIC-19 dan mengembangkan kit test PCR merah putih, mBio CoV-19 adalah Fara Rangkuti dari Nusantics.(ist)

BERIKUT 10 FAKTA MENARIK MENGENAI SARAH GILBERT

biotek yang mengkhususkan diri dalam pengembangan vaksin dan imunoterapi untuk penyakit menular, kanker, hepatitis B, HPV, dan kanker prostat dan sebagainya.

3. Pemimpin uji coba vaksin Ebola

Gilbert memimpin pengembangan dan pengujian vaksin flu universal pada awal tahun 2011. Vaksinasi itu tidak konvensional karena tidak merangsang produksi anti-tubuh, melainkan memicu produksi sel-T untuk melawan flu. Dia kemudian memimpin uji coba pertama vaksin Ebola pada tahun 2014, diikuti oleh Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS).

4. Bekerja keras selama pandemi Covid-19

Ya harus bekerja siang dan malam sejak merebaknya Covid-19. Ia bahkan bisa mendapat email kerja pada jam 4 pagi. Dalam wawancara yang sama, dia juga berbicara tentang pendekatan altruistik untuk memperbaiki situasi. "Sejak awal, kami melihatnya sebagai perlombaan melawan virus, bukan perlombaan melawan pengembangan vaksin lain. Kami adalah universitas dan kami tidak berada di sini untuk menghasilkan uang," ucapnya.

5. Vaksin Covid-19 AstraZeneca disetujui Inggris

Inggris menyetujui vaksin Covid-19 yang ia kembangkan bersama dengan

Oxford Vaccine Group pada 30 Desember 2020. Dalam sebuah wawancara dengan BBC, ia mengatakan bahwa ia merasa bahwa mereka dapat menggunakan pendekatan yang sama untuk MERS. Dia melanjutkan dengan ide itu ketika para ilmuwan China menerbitkan kode genetik virus.

6. Hidup untuk membuat vaksin

Gilbert menghabiskan sebagian besar waktu bekerja untuk memproduksi banyak vaksin berbeda. Caranya membuat vaksin dengan menggunakan teknologi yang sama untuk mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan selama pengembangan vaksin terhadap banyak virus berbeda yang berpotensi menyebabkan wabah, seperti MERS, Nipah dan Lassa.

7. Bukan dari keluarga dokter

Gilbert lahir di Kettering, Northamptonshire pada April 1962. Ayahnya bekerja di bisnis sepatu. Ibunya adalah seorang guru bahasa Inggris dan juga anggota masyarakat opera amatir lokal. Dia mewujudkan mimpinya bekerja di bidang kedokteran ketika dia masih di sekolah menengah.

Gilbert lulus dari University of East Anglia dengan gelar Bachelor of Science di bidang Biological Sciences. Kemudian pindah ke University of Hull untuk mengejar gelar doktornya di bidang genetika dan biokimia dari ragi *Rhodospiridium toruloides*.

8. Berawal dari membuat obat

Setelah gelar doktornya, ia bekerja sebagai peneliti postdoctoral di industri di Brewing Industry Research Foundation. Pada tahun 1990, ia bergabung dengan Delta Biotechnology, sebuah perusahaan biofarmasi yang memproduksi obat-obatan di Nottingham.

Setelah berbagai upaya dalam penelitian dan pekerjaan di antaranya, ia menjadi pembaca di Vaccinology di Oxford University pada tahun 2004. Pada 2010, ia menjadi profesor di Jenner Institute. Gilbert mulai mengerjakan desain dan pembuatan vaksin influenza baru dengan bantuan Wellcome Trust.

9. Pribadi yang pendiam

Seperti yang dinyatakan oleh rekan-rekan dan teman-temannya, Gilbert termasuk orang yang teliti, pendiam, dan teguh pendirian serta seseorang dengan ketabahan sejati. Dia juga tidak terlalu menikmati pusat perhatian.

10. Anak-anaknya jadi relawan vaksin

Sarah Gilbert juga merupakan ibu dari anak kembar tiga. Bahkan anak-anaknya berpartisipasi dalam uji coba vaksin. Untuk mendukung karir dan keluarganya, pasangannya, Rob Blundell juga menjadi pemberi perawatan utama.(*)



1. Profesor di Universitas Oxford

Sarah Gilbert adalah seorang ahli vaksin Inggris dan Profesor Vaksinologi di Universitas Oxford. Dia mengkhususkan diri dalam mengembangkan vaksin melawan influenza dan patogen virus yang muncul.

2. Pendiri perusahaan pengembang vaksin

Sarah Gilbert termasuk salah satu pendiri Vaccitech, sebuah perusahaan

KOMEDO DI TELINGA GEGARA PAKAI HEADPHONE TERLALU LAMA

Terkadang, apa yang mengenai kulit bisa menyebabkan iritasi mengganggu. Itu sebabnya dokter kulit sering menyarankan untuk melepas pakaian olahraga segera setelah selesai berolahraga. Sebab kain yang berkeringat itu dapat menyebabkan pori-pori tersumbat dan jerawat di tubuh. Juga disarankan menghindari produk berat dan berpotensi komedogenik di bawah area masker.

Semua itu untuk membuktikan bila apa yang dipakai dan digunakan benar-benar dapat mempengaruhi kulit. Bahkan sesuatu yang sepele seperti headphone dapat mempengaruhi kondisi telinga.

"Blackheads atau komedo terbuka benar-benar dapat terjadi di dalam saluran telinga, terutama jika kamu memakai AirPods untuk jangka waktu yang lama," kata dokter kulit Whitney Bowe, dalam TikTok baru-baru ini, seperti dilansir dari laman Mind Body Green.

Kamu bisa mendapatkan komedo dan jerawat di bagian manapun yang ada pori-pori, ini termasuk telinga. Hal ini mungkin kurang umum daripada jerawat di area permukaan lainnya (seperti wajah, punggung, dada, dan bahkan di garis rambut Anda), tetapi jerawat telinga pasti bisa terjadi, dan itu tidak perlu dikhawatirkan!

Saat memakai headphone, AirPods atau jenis earbud lainnya untuk waktu yang lama, kuncupnya dapat menghalangi aliran udara ke saluran telinga. Ini dapat berkontribusi pada penumpukan lilin, minyak, dan kotoran—dan penumpukan seperti yang kita tahu, dapat dengan mudah menyebabkan pori-pori tersumbat dan komedo. Ini bukan satu-satunya alasan pori-pori di sana bisa tersumbat, tapi kemungkinan besar penyebabnya adalah banyak pemakai headphone, terutama mereka yang mungkin bekerja dari rumah dengan earbud sepanjang hari.

Bowe memberikan cap persetujuannya untuk ekstraksi komedo profesional: "Ekstraksi sangat efektif di sana," catatnya. Namun jangan mencoba ekstraksi di rumah. Serahkan pemerasan kepada profesional, terutama di dekat saluran telinga yang sensitif. Kita harus mencatat, sebagian besar komedo sebenarnya akan muncul di mangkuk conchal (ruang kosong di telinga) daripada di saluran telinga itu sendiri; jadi pastikan siapa pun yang melakukan ekstraksi di sekitar lubang halus itu ekstra hati-hati.

Foto: <https://www.pexels.com/>



Ahli kecantikan selebritas Shani Darden merekomendasikan untuk mengoleskan serum AHA sangat tipis, untuk jerawat telinga, yang dapat membantu melepaskan sel-sel kulit mati, dan mendorong pergantian sel. Jika kamu sangat rentan terhadap pori-pori tersumbat di area tersebut, pastikan juga membersihkan telinga secara teratur.

Untuk mencegah telinga menjadi tempat berkembang biak yang berminyak bagi komedo, mungkin beri waktu telinga istirahat dari handphone untuk mendorong aliran udara. Ini bukan ilmu yang sempurna, tetapi jika bila memakai headphone selama berjam-jam dan merasa telinga tiba-tiba lebih berlilin dan berminyak,

itu mungkin layak untuk dicoba.

Cara Mengatasi

Beberapa dokter menggunakan pena khusus tanpa tinta untuk mengatasi jerawat. Kepala tumpul dari pena digunakan untuk menghilangkan jerawat, yang merupakan metode yang mudah dan bebas rasa sakit. Proses perawatan ini telah ditinjau oleh jurnal American Academy of Dermatology, seperti dilansir dari laman Boldkxy.

Sementara pilihan perawatan lain termasuk obat topical, obat vitamin A yang dijual bebas seperti krim retinoid yang diresepkan untuk mengobati jerawat telinga. Krim retinoid sangat efektif dalam mengobati jerawat telinga. Antibiotik seperti minocycline dan doxycycline juga bisa digunakan

untuk mengobati jerawat terkait bakteri. Bahan lainnya seperti Benzoyl peroxide yang dikenal berkhasiat dalam produk perawatan kulit untuk mengobati jerawat. Benzoil peroksida efektif membunuh jerawat penyebab bakteri. Dosis yang disarankan untuk benzoil peroksida adalah antara 2,5 hingga 10% persen.

Sedangkan untuk mencegah jerawat di telinga sebaiknya hindari berenang di air kotor. Bersihkan telinga Anda setiap hari untuk mengurangi sel-sel kulit mati dan sebum. Selain itu hindari meletakkan benda asing di telingam dan jangan lupa bersihkan headphone Anda untuk membantu mencegah jerawat telinga.(ist)

AWAS! UNDUH APLIKASI INI BISA BIKIN WHATSAPP DIBLOKIR

Aplikasi pesan WhatsApp memberikan peringatan akan memblokir akun pengguna jika mengunduh versi tidak resmi dari aplikasinya bernama GB WhatsApp. Versi tersebut sempat viral di media sosial.

"Jika Anda menerima pesan dalam aplikasi yang menyatakan bahwa akun Anda 'diblokir sementara', artinya Anda kemungkinan menggunakan versi WhatsApp yang tidak didukung aplikasi resmi," ujar pihak WhatsApp, seperti dikutip Express UK.

GB WhatsApp merupakan aplikasi Android yang mirip dengan WhatsApp sehingga pengguna mungkin menganggapnya dikembangkan oleh tim resmi. Namun, GB WhatsApp tidak ada hubungannya dengan aplikasi obrolan asli.

Sebaliknya, aplikasi ini menjanjikan sejumlah fitur yang tidak ditemukan di WhatsApp, termasuk kemampuan membalas pesan teks secara otomatis, mengirim lebih banyak foto dalam satu bundel, dan sejumlah manfaat lain yang tidak tersedia di aplikasi perpesanan resmi. Tautannya membuka kunci fitur-fitur tersebut yang belum tersedia di versi resmi WhatsApp.

Fitur tersebut memungkinkan GB WhatsApp untuk mendapatkan daya tarik di antara penggemar di seluruh dunia. Meskipun mungkin tergoda untuk mengunduh dan memasang aplikasi di ponsel untuk mendapatkan akses ke fitur-fitur itu, pengguna harus benar-benar yakin bahwa memang menginginkan trik tambahan tersebut.

"Jika Anda tidak beralih ke aplikasi resmi setelah diblokir sementara, akun Anda mungkin akan diblokir secara permanen dari penggunaan WhatsApp," kata pihak WhatsApp.

Aplikasi tiruan yang tertaut ke akun WhatsApp pengguna untuk menghadirkan kemampuan baru yang tidak didukung di aplikasi asli milik Facebook dilarang. Menurut WhatsApp, kebijakan ini dirancang



untuk melindungi pengguna dari masalah keamanan.

Menurut WhatsApp, aplikasi tiruan tidak didukung, seperti WhatsApp Plus, GB WhatsApp, atau aplikasi tiruan lainnya. Pihak WhatsApp menjelaskan aplikasi tidak resmi ini dikembangkan oleh pihak ketiga dan melanggar Persyaratan Layanan kami. "WhatsApp tidak mendukung aplikasi pihak ketiga ini karena kami tidak dapat memvalidasi praktik keamanan mereka."

GB WhatsApp tidak tersedia di Google Play Store. Sebagai gantinya, pemilik smartphone Android harus mencarinya dari repositori aplikasi tidak resmi secara online. Pengguna juga harus menonaktifkan beberapa pengaman yang diaktifkan secara default di Android untuk mengunduh dari web.

Apa itu WhatsApp GB?

WhatsApp GB adalah aplikasi WhatsApp non-resmi atau ilegal. Artinya, aplikasi ini tidak dibuat oleh WhatsApp dan tak tersedia di toko

aplikasi seperti Google Play Store maupun App Store. Pengguna yang mau pakai aplikasi ini perlu download di toko aplikasi non-resmi dalam bentuk dokumen APK.

Berdasarkan penelusuran, aplikasi WhatsApp GB sejenis dengan aplikasi modifikasi atau mod. Ia dikembangkan oleh salah satu member senior forum XDA Developers—tempat para pengembang membagikan aplikasi dan mod yang dia buat—yang memakai username Has.007. Secara resmi, pengembangnya menyebut nama aplikasi sebagai GB WhatsApp, dan bukan WhatsApp GB seperti yang dicatut netizen. Sama seperti aplikasi mod pada umumnya, WhatsApp GB menawarkan sejumlah fitur yang telah dimodifikasi dan tidak tersedia di aplikasi WhatsApp resmi. Beberapa di antaranya seperti: Opsi untuk menyembunyikan yang last seen; Opsi untuk menyembunyikan pesan yang dikirim; Opsi untuk menyembunyikan tanda dibaca; Menggunakan nama grup hingga 35 karakter; Gunakan status dengan maksimal 255 karakter ketimbang 139 karakter di aplikasi

resmi; Kirim broadcast ke 600 orang, bukan 250 orang hingga Mengelompokan chat dengan orang dan dengan grup.

Namun, pengguna WhatsApp GB juga patut khawatir dengan keamanan data pribadi mereka. Sebab, aplikasi mod rentan disalahgunakan oleh hacker lewat modus operandi bernama man in the middle (MITM) untuk mengambil alih akun dan informasi pengguna.

Seperti namanya, serangan man in the middle (MITM) terjadi ketika ada pihak ketiga, dalam hal ini adalah hacker, yang duduk di antara dua server dan memotong lalu lintas percakapan. Hal ini dimungkinkan karena percakapan lewat WhatsApp GB tidak terenkripsi secara end-to-end berkat server yang dipakai non-resmi.

Nah, ketika hacker berada di tengah-tengah percakapan, mereka bisa menguping, mencegah komunikasi, serta mencuri informasi. Dalam kasus WhatsApp modifikasi seperti WhatsApp GB, si peretas bisa mengaksesnya lewat chat.(ist)

LISTSTYLE

JURUS PAKAI ALOE VERA GEL UNTUK KECANTIKAN WAJAH

Kegunaan aloe vera atau yang biasa dikenal dengan lidah buaya memang banyak sekali. Salah satunya menyimpan banyak manfaat baik untuk kecantikan kulit. Tidak heran, kini banyak pula hadir di pasaran aloe vera dalam bentuk gel. Lalu, bagaimana saja cara menggunakan aloe vera untuk wajah?

Foto : <https://www.pexels.com/>

Untuk menjawabnya, kamu perlu tahu jika kegunaan aloe vera gel tidak hanya digunakan sebagai pelembap kulit saja. Namun, masih banyak cara lain menggunakan aloe vera gel untuk kecantikan wajah kamu.

MASKER

Ya, kamu bisa menggunakannya untuk teman perawatan masker wajah. Lalu, bagaimana cara memakai masker aloe vera yang tepat? Mudah, kok! Kamu hanya perlu mengoleskannya langsung pada wajah dan tunggu hingga 20 menit agar gel benar-benar meresap. Hasilnya kulit wajah tidak sekedar lebih lembap, namun juga segar seketika! Ulangi cara memakai masker aloe vera gel ini secara rutin, setiap 2 kali seminggu dan rasakanlah manfaatnya pada wajah.

PRIMER MAKE UP

Aloe vera gel juga dapat kamu jadikan sebagai kuci untuk mendapatkan yang lebih flawless. Cara pemakaian aloe vera gel untuk primer wajah juga praktis. Cukup aplikasikan pada seluruh wajah sebelum kamu memulaskan foundation. Lalu, diamkan beberapa saat hingga benar-benar mengering dan rasakan riasan yang

akan lebih menempel di kulit dengan sempurna. Plus, cara pemakaian aloe vera gel untuk primer ini bisa membuat riasan bertahan lebih lama, lho!

ATASI JERAWAT

Cara memakai aloe vera gel untuk mengatasi permasalahan jerawat yang membandel adalah dengan meng-aplikasikannya setiap malam sebelum kamu tidur. Pastikan wajah telah bersih

sebelumnya. Setelah itu, cara memakai aloe vera gel cukup dioleskan pada area wajah yang berjerawat dan biarkan hingga keesokan paginya. Psst, wajah pun dijamin terasa lembap dan lebih segar keesokan paginya!

SEGARKAN AREA KULIT MATA

Selain melembapkan kulit wajah

hingga mengatasi jerawat, kamu juga dapat mencoba cara pakai aloe vera gel lainnya untuk menyegarkan area mata. Oleskanlah langsung di area sekitar mata dan pijit perlahan. Jangan lupa lakukan cara pakai aloe vera gel ini setiap hari sebelum tidur malam agar tampilan mata tampak prima setelah kamu bangun tidur. Bye-bye puffy eyes! (ist)

DIY MASKER LIDAH BUAYA

Foto : <https://www.pexels.com/>

Masker lidah buaya sangat efektif untuk menenangkan kulit yang sensitif bahkan mencerahkan dan memperbaiki tekstur kulit apabila digunakan secara rutin. Untuk mendapatkan khasiatnya sangat mudah, karena kamu hanya perlu menyiapkan lidah buaya, madu murni dan air mineral atau air distilasi.

Cara membuatnya adalah dengan mengupas lidah buaya dan mencuci bersih daging

lidah buaya. Setelah itu, campurkan daging lidah buaya dengan air dan madu kemudian haluskan dengan blender untuk mencapai konsistensi yang cair. Jus lidah buaya ini harus kamu masukan ke dalam cetakan es batu dan dinginkan hingga beku. Untuk meng-gunakannya, kamu dapat melurukan es batu dari jus lidah buaya dengan dibungkus kain kasa atau tisu untuk mengurangi sensasi dinginnya. (ist)



Jokowi-Luhut Vs ... (dari hal 1)

Buka publik yang buta akan angka statistik, kritikan dilontarkan para ahli dan akademisi terkait klaim Presiden Jokowi mengenai kondisi pandemi di Indonesia. Guru Besar di Departemen Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Tjandra Yoga Aditama, memberi catatan atas klaim itu.

Menurut Tjandra Yoga, laju penularan kasus sudah turun atau belum bisa dilihat dengan cara membandingkan data awal penerapan PPKM Darurat pada 3 Juli dan data per kemarin, 20 Juli. Jika jumlahnya setara atau menjadi lebih rendah, PPKM Darurat bisa disimpulkan berhasil dalam mengendalikan laju penularan.

Tjandra Yoga lalu menerangkan, pada hari pertama PPKM Darurat tercatat ada 110.983 orang atau sampel spesimen yang diperiksa dan terdeteksi sebanyak 27.913 kasus Covid-19. Pada 20 Juli, ada 114.674 orang diperiksa dan kasus terkonfirmasi yang muncul sebanyak 38.325.

Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara periode 2018-2020 itu memaparkan bahwa seharusnya, dengan jumlah sampel spesimen sebesar itu, jumlah kasus terkonfirmasi pada 20 Juli sebesar $114.674 / 110.983 \times 27.913 = 28.841$.

"Tapi yang tercatat malah 38.325. Ini artinya jelas belum turun, bahkan lebih tinggi dari awal PPKM Darurat, baik secara angka mutlak maupun proporsi," ujarnya, Rabu (21/7).

Untuk diketahui, klaim disampaikan Presiden Jokowi saat mengumumkan perpanjangan masa PPKM Darurat 3-20 Juli hanya sampai 25 Juli men-

datang pada Selasa (20/7) malam.

Tjandra Yoga mengimbau perlu meninjau angka kasus infeksi baru beberapa hari ke depan hingga masa perpanjangan terbaru, 25 Juli. Dia berharap perbandingan semua parameter dilakukan terhadap awal PPKM Darurat 3 Juli. Dia merujuk kepada positivity rate, jumlah kematian, jumlah kasus baru, Keterisian Tempat Tidur (BOR) rumah sakit, angka perawatan di IGD, termasuk tren jumlah tenaga kesehatan yang tertular.

Sembari, dia mengingatkan PPKM Darurat tetap berlaku penuh alias tidak mengendur di masa perpanjangan. Pemerintah juga dimintanya meningkatkan tes sampai setidaknya 400 ribu per hari, dan memastikan telusur 15 orang dari setiap kasus seperti yang sudah direncanakan sebelumnya.

"Serta, terus meningkatkan vaksinasi untuk tetap bisa 1-2 juta orang per hari seperti yang sudah pernah dicapai beberapa waktu lalu," tutur mantan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, ini.

Hal senada dikatakan, Ketua Gerakan Dokter Indonesia Bersatu (DIB) Dokter Eva Sri Diana Chaniago. Dokter Eva menilai penurunan kasus disebabkan oleh testing yang juga menurun, artinya masih banyak orang positif yang belum terdeteksi.

"Angka kasus menurun tapi angka testing yang juga menurun tidak bisa disebut sebuah keberhasilan. Ini kesannya hanya klaim saja, entah apa maksudnya," kata Dokter Eva.

Testing Covid-19 menurun 68 persen dalam tiga hari terakhir, pada 17 Juli jumlah orang yang diperiksa mencapai 188 ribu, lalu menurun pada

18 Juli hanya 138 ribu dan 19 Juli hanya 127 ribu orang diperiksa.

Dokter Eva mendukung keputusan pemerintah memperpanjang PPKM, namun harus dibarengi dengan kewajiban melakukan 3T; testing, tracing, dan treatment, serta bantuan sosial bagi masyarakat terdampak PPKM. "PPKM tanpa adanya bantuan kebutuhan sembako yang memadai untuk rakyat, malah jadi miris. Rakyat memang akan terhindar dari bahaya covid, tapi bisa terancam kelaparan," jelasnya.

Pakai Level, Aturan Serupa

Pemerintah mengganti istilah PPKM Darurat Jawa-Bali melainkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 4 Jawa-Bali. Tidak ada perbedaan signifikan dari PPKM Level 4 ini dibanding dengan Inmendagri yang mengatur pembatasan kegiatan masyarakat sebelumnya.

Inmendagri tersebut dikeluarkan oleh Mendagri Tito Karnavian pada Selasa 20 Juli 2021 dan ditujukan kepada gubernur serta wali kota. Aturan tersebut mulai berlaku hari ini hingga 25 Juli 2021.

"Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat) Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen," tulis Inmendagri tersebut.

"Dan untuk melengkapi pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro serta mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk

Pengendalian Penyebaran Covid-19," lanjut pembuka Inmendagri itu.

Secara garis besar tidak ada bedanya dengan PPKM Darurat yang terutang dalam Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021. Contoh aturan untuk supermarket, pasar swalayan dan toko kelontong masih diwajibkan bukan sampai pukul 20.00. Kapasitasnya juga dibatasi 50 persen dengan prokes yang ketat.

Begitu juga dengan aturan rumah ibadah yang belum diizinkan untuk melaksanakan ibadah berjemaah. Restoran atau tempat makan tidak diperbolehkan melayani makan di tempat. Perbedaannya ada di aturan kebijakan Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) untuk usaha di sektor kritikal maupun esensial. Inmendagri Nomor 22 Tahun 2021 merinci persentasenya.

Aturan perjalanan juga tak berubah signifikan. "Dalam SE terbaru ini ada sejumlah perubahan yang kami muat. Di antaranya selama masa libur Idul Adha mulai 19 Juli sampai 25 Juli 2021, diberlakukan pembatasan seluruh perjalanan ke luar daerah," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi.

Sementara terkait penentuan level, tidak semua wilayah di Jawa dan Bali harus menerapkan PPKM Level 4. Khusus Bali tidak ada yang masuk ke PPKM Level 4. Dalam Inmendagri tersebut wilayah Bali disebutkan masuk PPKM Level 3. "Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan," tulis diktum kedua Inmendagri Nomor 22 Tahun 2021 tersebut. (ist,ins)

DAFTAR WILAYAH YANG HARUS MENERAPKAN PPKM LEVEL 4 DAN LEVEL 3.

JAKARTA
Semua wilayah Jakarta harus menerapkan PPKM Level 4

BANTEN
- PPKM Level 4 : Tangerang Selatan, Tangerang dan Kota Serang.
- PPKM Level 3 : Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kota Cilegon.

JAWA BARAT
- PPKM Level 4 : Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Banjar, Kota Bandung dan Kota Tasikmalaya.
- PPKM Level 3 : Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung.

JAWA TENGAH
- PPKM Level 4 : Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Klaten,

Kabupaten Kebumen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Banyumas, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Salatiga dan Kota Magelang.

- PPKM Level 3 : Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Tegal, Kabupaten Sragen, Kabupaten Semarang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Blora, Kabupaten Batang, Kabupaten Banjarnegara, dan Kota Pekalongan.

DI YOGYAKARTA
- PPKM Level 4 : Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta.
- PPKM Level 3 : Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul.

JAWA TIMUR
- PPKM Level 4 : Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Blitar dan Kota Batu.
- PPKM Level 3 : Kabupaten Tuban,

Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Blitar, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, dan Kota Pasuruan.

Bali
PPKM Level 3 : Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli dan Kota Denpasar.



MOBILITAS WARGA SAAT PPKM DARURAT JAWA-BALI

Data 6 Juli 2021 (PPKM DARURAT) terhadap data 25 Juni 2021

Provinsi	Reatail & Rekreasi	Toko Bahan Makanan & Apotek	Taman	Transportasi Umum	Tempat Kerja	Area Pemukiman
1. Banten	-13	-12	-14	-17	-9	6
2. Jakarta	-18	-16	-10	-16	-12	7
3. Jawa Barat	-18	-16	-10	-16	-12	7
4. Jawa Tengah	-12	-10	-14	-19	-5	5
5. Yogyakarta	-23	-14	-25	-28	-13	9
6. Jawa Timur	-17	-11	-24	-26	-11	8
7. Bali	-12	-8	-17	-21	-6	7

NOW!!!

Jakarta- Sejumlah kecacatan administrasi dalam pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK diungkap oleh Ombudsman. Mulai dari penyalahgunaan wewenang hingga pengabaian arahan Presiden Jokowi. Lebih ironis lagi, ditemukan penyimpangan prosedur penanggalan mundur atau back date yang digunakan dalam kontrak antara KPK dengan BKN. Padahal pola tersebut kerap menjadi modus dalam sebuah kasus korupsi yang ditangani oleh KPK.

Black date dilakukan terkait dengan Nota Kesepahaman Pengadaan Barang dan Jasa KPK dengan BKN pada 8 April 2021 serta kontrak Swa Kelola pada 25 April 2021. Padahal, pelaksanaan TWK pada 9 Maret 2021. Yang lebih mengejutkan dari temuan Ombudsman ialah ada penandatanganan dengan tanggal mundur menjadi 25 Januari 2021.

Hal serupa terjadi saat KPK mengungkap kasus Mafia Tanah di Munjul Jakarta Timur, yang menyeret lima orang tersangka salah satunya eks Dirut PD Sarana Jaya, terdapat juga pola back date yang diungkap KPK. Pola ini menjadi salah satu masalah melawan hukum yang ditemukan KPK dalam kasus korupsi yang diduga merugikan negara Rp 152,5 miliar itu.

Terkait temuan ini Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron sempat beralasan bahwa hal itu terkait masalah pembiayaan TWK. Yakni adanya perubahan dari awalnya menggunakan anggaran KPK tapi kemudian dibatalkan karena pada akhirnya memakai anggaran BKN. Ia beralasan bahwa MoU itu tidak dipakai.

Namun, hal itu dibantah anggota Ombudsman, Robert Endi Jaweng. Sebab, isi dokumen tak hanya soal anggaran. "Jangan lupa isi dokumen tidak hanya sekadar pembiayaan terkait asesmen tapi juga mekanisme dan kerangka kerja. Bisa dibayangkan barang ditanda tangan bulan April back date Januari, pelaksanaan di Maret," kata Robert dalam konferensi pers yang digelar Ombudsman, Rabu (21/7). "Ini penyimpangan prosedur buat kami cukup serius tata kelola administrasi lembaga dan mungkin juga terkait masalah hukum," ujar dia.

Tak hanya itu, Ombudsman pun menilai ada penyalahgunaan wewenang yang terjadi dalam proses TWK. Hal ini terkait rangkaian harmonisasi Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 yang



Seorang aktivis memakai kostum karakter Thanos sebagai simbol penghancur KPK saat melakukan aksi terkait protes hasil TWK KPK.

Ombudsman Temukan TWK KPK 'Cacat'

IRONIS! DIDUGA LAKUKAN BACK DATE ALA KORUPTOR

kemudian memuat ketentuan TWK dan penyelenggaraannya bersama BKN.

Berdasarkan pemeriksaan, Ombudsman menemukan bahwa rangkaian harmonisasi pada Desember 2020, belum ada klausul mengenai asesmen TWK. Termasuk soal kerja sama KPK dengan BKN dalam menggelar TWK. Klausul soal TWK itu baru muncul pada Januari 2021.

Ombudsman meyakini ketentuan soal TWK itu disisipkan dalam proses harmonisasi Peraturan KPK Kejanggalaan lainnya pun diungkapkan Ombudsman. Merujuk Permenkumham Nomor 23 Tahun 2018, proses harmonisasi cukup dihadiri Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), pejabat administrator, dan perancang.

Menurut Ombudsman, selama proses harmonisasi, ketentuan ini memang dipatuhi. Harmonisasi dipimpin Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham. Namun,

pada 26 Januari 2021 atau pada rapat terakhir, ada kejanggalaan yang ditemukan. Rapat itu dihadiri langsung Ketua KPK, Kepala BKN, Kepala LAN, Menteri PAN RB, dan Menkumham.

"Sesuatu yang luar biasa, harmonisasi itu levelnya adalah pada level JPT sesuai Permenkumham, tapi untuk Perkom itu dihadiri para pimpinan lembaga," ujar Robert.

Tak hanya itu, meski lima pimpinan lembaga dan kementerian hadir langsung dalam rapat, tapi mereka tidak menandatangani berita acara harmonisasi. Pihak yang meneken berita acara justru merupakan pejabat yang tidak hadir.

"Kepala Biro Hukum KPK dan Direktur Perundangan di Kemenkumham. Yang hadir adalah para pimpinan. Yang susun dan tanda tangan malah yang tidak hadir. Ombudsman berpendapat ada penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang di sana," imbuh dia.

Untuk diketahui, penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu unsur yang termuat dalam pasal pada UU Tindak Pidana Korupsi. Hingga saat ini, pihak KPK belum memberikan tanggapan atas temuan Ombudsman itu. Pimpinan dan juru bicara belum memberikan respons.

KPK diminta mengangkat 75 pegawai itu menjadi ASN. Sebab, Robert menilai ada temuan mal-administrasi pada tahapan pembentukan kebijakan, pelaksanaan TWK, dan penetapan hasil. "Jika dalam 30 hari tindakan korektif tidak dilaksanakan dan Ombudsman akan monitoring untuk memantau itu tetapi jika tidak diindahkan maka kepada KPK dan kepada BKN akan diberikan rekomendasi dan itu wajib dilaksanakan 60 hari ke depan setelah 30 hari tindakan korektif tidak dilaksanakan, jika tidak, maka akhirnya ini kembali pada Presiden," imbuh dia. (ist)

TEMUAN OMBUDSMAN TERKAIT PENYIMPANGAN TWK KPK

- Ketua KPK tidak patut menerbitkan Surat Keputusan Nomor 652 Tahun 2021
- Pengabaian KPK sebagai lembaga negara yang masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif terhadap pernyataan Presiden tanggal 17 Mei 2021
- Pengabaian Menteri PAN-RB, Menteri Hukum dan HAM, Kepala BKN, 5 Pimpinan KPK, Ketua KASN, dan Kepala LAN terhadap pernyataan Presiden tanggal 17 Mei 2021
- Penyalahgunaan wewenang Menteri PAN-RB, Menteri Hukum dan HAM, Ketua KASN, dan Kepala LAN terkait kepastian status Pegawai KPK dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja

POIN MALADMINISTRASI TWK KPK

- Penyisipan Ayat soal TWK
- Kehadiran Pimpinan Kementerian dan Lembaga yang Tak Lazim
- KPK Tak Sebarluaskan Info TWK ke Pegawai
- Penyimpangan prosedur
 - a. Pelaksanaan rapat harmonisasi terakhir yang dihadiri oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga yang seharusnya dikoordinasikan dan dipimpin oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. Tidak menyebarluaskan informasi rancangan Peraturan KPK.
- Penyalahgunaan wewenang
- Kontrak Backdate

- Pada penandatanganan berita acara pengharmonisan yang dilakukan oleh pihak yang tidak hadir pada rapat harmonisasi tersebut.
- BKN tidak berkompeten

SARAN PERBAIKAN KE PRESIDEN JOKOWI DARI OMBUDSMAN

1. Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN, perlu mengambil alih kewenangan yang didelegasikan kepada pejabat pembina kepegawaian KPK terkait pengalihan status 75 pegawai KPK menjadi pegawai ASN.
2. Presiden perlu melakukan pembinaan terhadap Ketua KPK, Kepala BKN, Kepala LAN, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri PAN-RB bagi

perbaikan kebijakan dan administrasi kepegawaian yang berorientasi kepada asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Presiden melakukan monitoring terhadap tindakan korektif yang disampaikan Ombudsman kepada BKN untuk menyusun peta jalan manajemen kepegawaian, khususnya ihwal mekanisme, instrumen, dan penyiapan asesor terkait pengalihan status pegawai menjadi pegawai ASN di masa depan.

4. Dalam rangka mewujudkan tata kelola SDM aparatur unggul, Presiden perlu memastikan bahwa pelaksanaan TWK dalam setiap proses manajemen ASN dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku.

